



Minta Dinsos Lebih Cermat Pendataan

DPRD Pertanyakan Perwal Penerima KMS

JOGIA - Proses pelaksanaan Kartu Menuju Sehat (KMS) 2019 di Kota Jogja mendapat kritik pedas dari legislatif. Peraturan wali kota (perwal) tentang penerima bantuan seharusnya selesai tahun lalu, namun hingga awal bulan ini belum ada tersiar kabar.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menilai, pelaksanaan KMS terkesan amburadul. "Sampai Januari belum terbit Perwal tentang penerima KMS, padahal sesuai tatakala harusnya Desember lalu sudah kelar," ungkapnya kemarin (4/1).

Fokki menuturkan, Dinas Sosial Kota Jogja dalam melakukan pendataan penerima berdasar pada BDT (Basic Data

Tunggal) yang merupakan keputusan Kementerian Sosial. Dinsos kemudian memverifikasi penerima sejumlah 24.760 kepala keluarga (KK).

Data ini terdiri atas 17.253 KK (pemegang KMS tahun 2018) dan 7.507 KK yang merupakan usulan RT/RW. Namun dari data itu, Fokki melihat hingga kini masih banyak lapisan masyarakat yang dirasa belum menerima sepenuhnya, termasuk

penyanggah disabilitas.

Selain itu, sering timbul kecemburuan di masyarakat, karena ada masyarakat yang dirasa mampu, namun lolos uji publik dan terdata penerima KMS. Anggota Fraksi PDIP ini meminta Dinsos lebih cermat lagi dalam proses verifikasi uji publik kedua.

"Dinsos dalam verifikasi hasil uji publik kedua agar bisa lebih cermat lagi dalam menilai. Se-

hingga harapannya ketika sudah ditetapkan oleh Perwal, maka penerima KMS benar-benar tepat sasaran," ungkapnya.

Tahun 2019 data penerima bantuan sosial ini juga akan masuk ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemberdayaan dan dikelola Bappeda. "Sehingga semua OPD dapat mengakses dan melihat data penerima. Kemudian membuat program pengentasan kemiskinan yang

tepat sasaran," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial Dinsos Kota Jogja Supriyanto mengungkapkan, penerima KSPJPS dilihat dari tujuh aspek. Parameter itu, di antaranya, pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan kondisi sosial.

KSPJPS nantinya akan menyasar keluarga yang memiliki luas rumah kurang dari 8 m2 atau yang me-

iliki pendapatan rata-rata kurang Rp 423.815 sesuai pendataan BPS. Ia juga menjelaskan bobot penilaian akan dilihat dari penggabungan ke tujuh aspek itu.

"Jadi tidak hanya melihat pada satu faktor saja. Nantinya dari tujuh aspek itu akan dikolaborasi dan diberikan bobot, sehingga akan dihasilkan data. Pola itu yang menentukan penerima KSPJPS," jelas Supriyanto. (cr5/laz/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005